

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha mikro adalah unit usaha dengan asset bersih maksimum Rp. 200 juta di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki 1-4 tenaga kerja. Usaha kecil berasset Rp. 200 juta – 1 milyar atau memiliki tenaga kerja 5-9 orang. Usaha menengah mempunyai asset diantara 1 milyar-50 milyar dengan tenaga kerja 20-99 orang. Dari total unit usaha, jumlah usaha mikro diantara 85%-90%, jumlah usaha kecil sekitar 10%-12%, sisanya 2%-3% adalah usaha menengah dan usaha besar.

Peran UMKM di Jawa Timur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi hingga 7,22%. Tingginya angka pertumbuhan ekonomi secara otomatis berdampak langsung menurunkan kemiskinan hingga 2,83% atau menyumbang 37% angka penurunan kemiskinan nasional, karena pelaku UMKM berawal dari masyarakat tidak mampu namun memiliki semangat berwirausaha dan kerja keras. Pentingnya peran UMKM harus didukung oleh stakeholder, karena UMKM menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. Data menyebutkan, 98% tenaga kerja di Jawa Timur ada dalam UMKM, sedangkan *corporate* (perusahaan besar) hanya menyerap 1,8% tenaga kerja

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, perlu ada kebijakan dari pemerintah, terutama meningkatkan tiga poin penting dalam pertumbuhan UMKM, yaitu uang (modal), SDM, dan pasar agar dapat berkembang pesat. Peran

serta pemerintah dalam Koperasi dan UMKM adalah UPT Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yaitu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan pendidikan, bimbingan dan pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia Koperasi dan UMKM. (Media Info KUMKM edisi 01, 2012).

Upaya perkembangan atau kelangsungan hidup UMKM menghadapi berbagai kendala atau masalah, yaitu :

1. Masalah permodalan karena ketiadaan jaminan
2. Masalah SDM karena Kurangnya tenaga professional dalam bidang akuntansi
3. Kurangnya pengetahuan tentang manajemen bisnis/keuangan
4. Minimnya pengetahuan tentang ilmu akuntansi/informasi akuntansi
5. Kurangnya minat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, utamanya akuntansi
6. Latar belakang pendidikan pelaku usaha
7. Tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM/ketiadaan SAK UMKM

Pokok permasalahan perkembangan UMKM adalah pengelolaan atau manajemen keuangan, karena banyak UMKM beranggapan bahwa pengelolaan/manajemen keuangan adalah hal yang mudah dan sederhana. Kenyataannya, pengelolaan/manajemen keuangan memerlukan keterampilan akuntansi yang baik oleh para pelaku usaha.

Wahdini dan Suhairi (2006) disebutkan bahwa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dirasakan sangat memberatkan bagi UMKM dibandingkan

dengan usaha besar. Praktek akuntansi, khususnya akuntansi keuangan pada UKM di Indonesia masih rendah dan memiliki banyak kelemahan. Kelemahan itu, antara lain disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dari manajer/pemilik dan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UKM.

Saat ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah merancang suatu standar pelaporan keuangan bagi UKM yang kemudian dinamakan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada 19 Mei 2009, dan sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2011. Standar ini dikemas cukup ringkas, tidak banyak merubah prinsip-prinsip yang umumnya telah dilaksanakan saat ini. Kehadiran Standar ini diharapkan entitas-entitas bisnis yang tidak terdaftar dalam pasar modal dapat mengaplikasikannya sebagai standar akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima secara umum.

Pratiwi dan Tituk (2011) disebutkan bahwa kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah sesuatu yang perlu dalam penerapan aturan yang harus diterapkan dalam penyusunan, pengakuan, dan pencatatan suatu transaksi agar tidak menyimpang dari aturan yang diterapkan dan mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yaitu 59% UMKM membutuhkan SAK ETAP karena SAK ETAP akan mempermudah UMKM dalam menyusun Laporan Keuangan.

Kenyataannya tingkat kebutuhan SAK ETAP bagi UMKM masih sangat rendah. SAK ETAP juga masih dianggap memberatkan UMKM. Hal ini dikarenakan para pelaku usaha UMKM tidak memiliki pengetahuan akuntansi, dan banyak diantara mereka belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan hidup usahanya. UMKM memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan, sehingga pengelolaan laporan keuangan UMKM terkesan apa adanya. Dampaknya, keberhasilan pengelolaan UMKM menjadi berantakan dan akan menyulitkan manajer/pemilik dalam mengontrol informasi akuntansinya. Inilah yang menjadi permasalahan UMKM pada saat ini, khususnya masalah pengelolaan atau manajemen keuangan. permasalahan tersebut akan menjadi kendala dalam perkembangan dan kelangsungan hidup UMKM.

Laporan keuangan dapat membantu para pemilik memperoleh data dan informasi yang tersusun secara sistematis. Dengan adanya laporan keuangan, pemilik juga dapat memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui jumlah tambahan modal yang dicapai, dan juga dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki. Sehingga setiap keputusan yang diambil oleh pemilik dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi sesungguhnya keuangan yang dilaporkan secara lengkap bukan hanya didasarkan pada asumsi. Dan laporan keuangan menjadi salah satu komponen yang mutlak harus dimiliki oleh UMKM jika mereka ingin mengembangkan usaha dengan mengajukan modal kepada para kreditur yang dalam hal ini adalah pihak perbankan.

Surabaya memiliki prospek dalam perkembangan bisnis UMKM yang potensial. Berdasarkan observasi sementara diperoleh informasi bahwa sebagian UMKM di Surabaya telah mencatat aktivitas keuangan usaha mereka, meskipun belum sempurna bentuk dan urutan laporan keuangan, namun dari pencatatan tersebut dapat dilihat dan diperoleh informasi keuangan perusahaan.

Menyadari pentingnya peran UMKM dan karena beberapa permasalahan yang ada, antara lain : wacana yang telah dijelaskan diatas dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang sulitnya penerapan SAK dalam penyusunan laporan keuangan UMKM, maka penulis melalui penelitian ini ingin mencari suatu kejelasan dan juga menjadikan judul dalam penulisan tersebut yaitu: **STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI SURABAYA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK ETAP berdasarkan jenis kelamin, pengalaman kerja, pendidikan, dan pelatihan (Studi pada UMKM Perorangan di Surabaya).

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bentuk pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK ETAP berdasarkan jenis kelamin, pengalaman kerja, pendidikan, dan pelatihan (Studi pada UMKM Perorangan di Surabaya).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi
 - a. Memperkaya wawasan akuntan pendidik dan mahasiswa terkait isu akuntansi.
 - b. Memberikan sumbangsih pemikiran tentang pemahaman SAK-ETAP.
 - c. Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana akademisi melaku pengabdian masyarakat pada pelaku bisnis seperti UKM.
 - d. Memberikan hasil informasi aktual tentang kondisi UKM, sehingga perguruan tinggi bisa sebagai mitra dalam program pendampingan pengelolaan keuangan UKM.
2. Bagi Pelaku UKM
 - a. Memberikan informasi dan wawasan tentang pemahaman SAK-ETAP guna penyusunan laporan keuangan dalam meningkatkan kinerja UKM.
 - b. Memberikan pengetahuan tentang pemahaman SAK-ETAP guna memperbaiki sistem manajemen dan pelaporan akuntansinya.

- c. Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk lebih mengetahui besarnya manfaat pencatatan keuangan sebagai sumber informasi keuangan yang bisa digunakan sebagai perencanaan biaya, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan bagi UKM.

3. Bagi Penulis

- a. Sarana untuk menetapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh dari sumber-sumber lain sehingga bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam penulisan, penguraian serta penjelasan didalam penulisan skripsi ini maka penulis membagi dalam lima bagian, yang dimana meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini diuraikan secara garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini diuraikan hal-hal yang terkait dengan penelitian terdahulu, landasan teori yang mendasari penelitian. Selain itu juga menyajikan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini diuraikan hal-hal mengenai rancangan dan batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan instrument penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Bab ini berisikan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data yang disertai dengan analisis deskriptif dan pembahasan pada setiap variabel.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian serta keterbatasan dari penelitian dan saran yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang terkait.